PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)

SKRIPSI

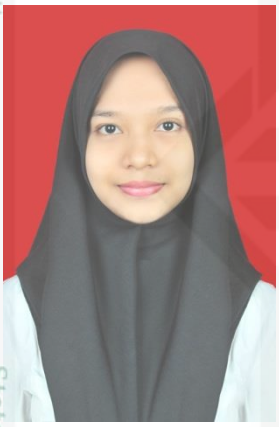

Disusun Oleh:

MEYSA KHALIFA
NIM : 11773201122

JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN LMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

MEYSA KHALIFA
NIM : 11773201122

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN LMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Meysa Khalifa
Nim	: 11773201122
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Program Studi	: S1 Akuntansi
Judul	:Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)
Tanggal Ujian	: 07 Oktober 2021

Disetujui Oleh
Pembimbing

Anna Nurlita, SE, M.Si
NIK. 130 717 123

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Akuntansi S1
Dr. Hj. Maryarni, SE, MM **NIP. 19700826 199903 2 001**	**Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt** **NIP. 19741108 200003 2 004**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MEYSA KHALIFA
NIM	: 11773201122
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN	: AKUNTANSI S1
JUDUL	:PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)
TANGGAL UJIAN	: KAMIS, 07 OKTOBER 2021

DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI

Dr. KHAIRIL HENRY, SE, M.Si, Ak
NIP. 197511292008011009

MENGETAHUI

PENGUJI I	PENGUJI II
IDENTITI, SE, M.Ak, Ak, CA	**ARAS AIRA, SE, M.Ak, CA**
NIP. 196906232009012004	**NIK. 130411020**

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Taanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Meysa Khalifa
NIM	: 11773201122
Tempat/Tgl. Lahir	: Sungai Piring, 21 Mei 1999
Fakultas/Pascasarjana	: Ekonomi dan Ilmu Sosial/ UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Prodi	: Akuntansi
Judul Skripsi	:

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 September 2021
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
D497CAJX463396127

MEYSA KHALIFA
NIM: 11773201122

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)

Oleh:

MEYSA KHALIFA
NIM. 11773201122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah serta peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yaitu kuntitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini seluruh perangkat desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis – Partial Least Square (SEM-PLS) dengan alat analisis data Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dan peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil uji R square menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 79,9%, sementara 20,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : *Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kemudahan, dan kasih sayang-Nya. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)".** Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta Staf.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Akt. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Anna Nurlita, SE. M. Si selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan, dan sumbangan pikiran kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianty MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
11. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Ramlan dan Ibunda Hj. Siti Hairani yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa untuk kesuksesan anaknya. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kesabaran,

nasehat, dan cinta yang tiada henti yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali doa yang terus menerus untuk Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

12. Abang tersayang Surya Maisun dan Padli serta Kakak-kakak tersayang Sri Hartati, Nurmila, Ruswinda, Husniati serta keluarga lainnya yang telah memberi dukungan, semangat, perhatian dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu mengasihi dan menyayangi mereka.
13. Keponakan-keponakan tercinta dan tersayang yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skiripsi ini dengan baik.
14. Sahabat-sahabat tersayang dan seperjuangan Maydea Nesrianti, Gita Aprianti, Sely Afiza, Safira Yasmin, Aulia Septianis, Widia Wati, Maimunah, dan Nurnilam Sari yang selalu memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Lokal B Akuntansi S1 2017 yang saling berbagi ilmu, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
16. Teman-teman Akuntansi S1 Lokal A Konsentrasi Akuntansi Keuangan 2017 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
Penulis

Meysa Khalifa
NIM 11773201122

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan masyarakat dan daerah. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja pemerintah bukan hanya bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah termasuk dalam pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dikelola dengan baik. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan tentang pengelolaan desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa harapan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut beberapa diantarannya yaitu alokasi anggaran yang besar yang diberikan kepada desa ditujukan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan desa, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, adanya penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa beserta perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kinerja seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pada masa sekarang keakuratan dalam penerapan akuntansi keuangan desa masih diragukan, karena melihat fasilitas dan kemampuan perangkat desa yang masih rendah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Terdapat masalah rendahnya administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minimum, sistem administrasi yang masih lemah serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Alokasi anggaran yang begitu besar di satu sisi sangat menguntungkan bagi desa untuk melakasanakan pembangunan, namun disisi lain hal tersebut dapat menjadi malapetaka apabila desa tidak mampu mengelola anggaran dan membuat pertanggungjawaban.

Anggaran dana desa yang cukup besar tidak menutup kemungkinan mengakibatkan banyaknya terjadi kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Sejak ditetapkannya peraturan tentang dana desa terdapat

banyak kasus korupsi dana desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah modus dari penyalahgunaan anggaran dana desa seperti pengalahgunaan anggaran, laporan fiktif, pengggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Selain itu, permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat ditimbulkan dikarenakan niat kejahatan melainkan juga dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus korupsi dana desa terus terjadi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 ini dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 264 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018. Jumlah tersebut diketahui rata-rata meningkat setiap tahunnya, dari 22 kasus pada tahun 2015 dan 48 kasus pada tahun 2016. Kemudian meningkat pada tahu 2017 dan 2018 menjadi 98 dan 96 kasus. (Republika.co.id: Tahun 2019).

Pada tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 dibandingkan kasus korupsi di sektor-sektor lainnya. Terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran dana desa ini menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 32,3 Miliar. (Kompas.com: Tahun 2020).

Dan pada tahun 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah terebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan

dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. (databoks.katadata.co.id : Tahun 2020).

Kasus korupsi anggaran dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 yaitu pada Kepala Desa dan sekretasi Desa Panglima Raja. Keduanya mengkorupsi anggaran pembangunan desa yang menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp.309.589.335. (merdeka.com, Tahun 2018).

Pada bulan April 2020 lalu, sebanyak 18 Kepala Desa yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau. Dari informasi yang dirangkum, Kepala Desa yang dilaporkan itu salah satunya berasal dari Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka. (Riauonlone.co.id: Tahun 2020). Laporan tersebut merupakan laporan dugaan penyelewengan dana desa dan tuduhan tentang kelebihan anggaran dari sisi pembangunan fisik. (dpmd.Inhilkab.co.id: Tahun 2020).

Peneliti juga telah melakukan observasi langsung ke tempat dilakukannya penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah variabel yang digunakan di dalam penelitian ini telah diterapkan di desa yang menjadi sampel penelitian serta untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desanya. Melalui kegiatan tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa desa-desa yang ada di kecamatan Batang Tuaka dalam pengelolaan keuangan desanya telah menggunakan Sistem keuangan desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan adanya peranan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat indikasi masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desanya. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah melainkan juga kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

a. Laporan realisasi APD Desa
b. Laporan realisasi kegiatan
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
d. Sisa anggaran
e. Alamat pengaduan

Berdasarkan hasil observasi peneliti, desa-desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka tidak menyampaikan pertanggujawaban dalam pengelolaan keuangan desanya kepada masyarakat melalui media informasi sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena yang ada terdapat indikasi masih rendahnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem informasi yang memadai dan adanya peran perangkat desa yang profesional menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa.

Banyaknya kasus korupsi anggaran desa yang terus terjadi merupakan masalah serius bagi pemerintah yang harus segera diatasi untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menuntut pemerintah agar dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya terhadap desa–desa yang terindikasi dan terbukti bersalah, namun juga pada desa-desa lainnya agar dana desa dapat disalurkan dan digunakan sebagaimana mestinya dan serta tidak disalahgunakan, sehingga masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan sistem keuangan desa diharapkan mampu mencegah tindak korupsi dana desa terus terjadi. Sistem keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa. Penelitian oleh (Saragih & Kurnia, 2019) membuktikan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) yang membuktikan bahwa Sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pegelolaan dana desa. (Ardianti & Suartana, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Samad, 2019) menyimpulkan bahwa sistem

keuangan desa belum berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Serta penelitian oleh (Amalya, Tuti, 2017) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa (siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan standar pengendalian dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah pusat sudah memiliki sistem untuk melakukan pengendalian yaitu pengendalian intern pemerintah. Sistem ini digunakan untuk melakukan pengawasan dalam jalannya roda pemerintahan yang diharapkan dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan. Penelitian terdahulu oleh (Martini, 2019) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpangaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yesinia et al., 2018) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolalaan alokasi dana desa di kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Penelitian (Widyatama et al., 2017) dan penelitian (Martini, 2019) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) dan (Santoso, 2016) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting dalam mengelola keuangan desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa tentunya diperlukan perangkat desa yang dapat bekerja secara professional agar seluruh anggaran desa dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penelitian oleh (Setiawan & Yuliani, 2017) membuktikan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut (Elviani, 2019) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih & Kurnia, 2019), (Yesinia et al., 2018), (Indrianasari, 2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2019) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Matan Hilir Selatan.

Desa yang memperolah anggaran dana desa dari pemerintah pusat tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjdi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, karena dalam mengelola keuangan desa terdapat resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya masalah hukum karena belum memadainya

fasilitas dan kompetensi dalam hal pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) yang berjudul "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analaisis data yaitu regresi berganda. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan adanya perbedaan karakteristik dan latar belakang di setiap desa, mendorong peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) dengan judul "Pengaru Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (i) variabelnya dengan penambahan variabel independennya yaitu Peran Perangkat Desa. Alasan peneliti menambahkan variabel Peran Perangkat Desa yaitu dengan adanya peran perangkat desa yang profesional diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa yang professional sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya juga (Saragih & Kurnia, 2019). (ii) Objek penelitian, Penelitian ini dilakukan di seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan (iii) perbedaan yang ketiga yaitu metode analisis data, penelitian ini menggunakan motode *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan program *SmartPLS3.0*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengawasan agar dapat menjamin terlaksananya akuntabiltas pengelolaan keuangan desa agar dapat mencegah terjadinya tindak korupsi dana desa yang dapat merugikan Negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sejauh mana pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitaas pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Batang Tuaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 di tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu "**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)".**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang fenomena dan konsep yang memerlukan pencegahan dan solusi atau jawaban Dalam suatu penelitian dan pemikiran dengan menggunakan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan pengungkapan hasil yang ingin dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk manguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

   Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran dari perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Instansi terkait

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang bagaimana penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran dari perangkat desa yang

bersama sama berperan penting demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian berikut membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian penelitian dan sistematika penelitian..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian berikut membahas teori atau konsep yang digunakan, konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam Islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian berikut membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik mengumpulan data, variabel operasional serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran yang diberikan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship* yang merupakan bagian dari *Agency Theory*. Teori ini menggambarkan dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil untuk kepentingan organisasi (Donalson & Devis, 1991). Konsep *Stewardship* menganggap manajemen bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai *principal* dan manajemen sebagai *steward.*

Teori *stewardship* dibangun atas filosofis tentang sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Berdasarkan filosofi ini tersirat suatu hubungan yang berlandaskan kepercayaan sehingga manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik.

Implikasi Teori *Stewardship* dalam penelitian ini pemerintah desa bertindak sebagai *steward* dan dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah Desa bertugas sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak untuk kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

2.1.2 Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal I, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2.2 Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pempinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh

pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat desa setempat beserta pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepada desa berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya. Setiap jajaran memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3) Harus dapat menunjukkan tingkat pendapatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diprolah,
5) Harus jujur, objektif, transparan dan inivatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja laporan akuntabilitas

2.1.3.3 Dimensi Akuntabilitas

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

   Akuntabilitas kejujuran (*accountability for frobity*) adalah akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power)*, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukumdan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baikdalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

   Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.3.4 Sumber pendapatan Desa

Penyelenggaraan keuangan pemerintahan desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Sumber Pendapatan desa terdiri dari:

- Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
- Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
- Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Pinjaman desa

APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencaaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

2.1.3.5 Siklus pengelolaan keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APD Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap peneimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhr bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

1) buku pembantu bank;
2) buku pembantu pajak; dan
3) buku pembantu panjar

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/ Wali Kota dan ada pula Laporan yang disampaikan ke BPD. Menurut

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Laporan yang dimaksud antara lain terdiri dari:

1) Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan
2) Laporan realisasi kegiatan

e. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa membuat dan meyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disetai dengan:

1) Laporan Keuangan terdiri atas:
   - Laporan realisasi APD Desa; dan
   - Catatan atas laporan keuangan.
2) Laporan realisasi kegiatan; dan
3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APD Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu ke dua bulan April tahun berjalan.

Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

a) Laporan realisasi APD Desa;

b) laporan realisasi kegiatan;

c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d) sisa anggaran; dan

e) alamat pengaduan

2.1.3.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Kuangan Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantara yaitu Sistem keuangan desa (Arfiansyah, 2020) (Abdullah & Samad, 2019) dan (Saragih & Kurnia, 2019), faktor lainnya yaitu Sistem Pengendalian intern Pemerintah (Yesinia et al., 2018), (Arfiansyah, 2020), (Martini, 2019), dan faktor Peran Perangkat desa (Setiawan & Yuliani, 2017), (Saragih & Kurnia, 2019), (Yesinia et al., 2018).

Selain itu terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu Aksesibilitas laporan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020) , Kepemimpinan Kepala Desa (Dewi & Gayatri, 2019), Penyajian laporan keuangan (Nisya, 2017).

Dalam penelitian ini untuk faktor yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran perangkat desa.

2.1.3.7 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu indikator yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya

yaitu oleh (Arfiansyah, 2020). Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. perumusan rencana keuangan
2. pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
3. melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
4. pelaksanaan pelaporan keuangan

2.1.4 Sistem Keuangan Desa

2.1.4.1 Pengertian Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam melakukan pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuanga desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban

keuangan desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan SAPDesa dilatar belakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa.

Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa dan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan. Aplikasi Siskeudes memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban.

2.1.4.2 Dimensi Sistem Keuangan Desa

Menurut (DeLone dan McLean, 1992) dalam (Arfiansyah, 2020) menyatakan bahwa dimensi untuk mengetahui kesuksesan implementasi sebuah sistem yaitu melalui dimensi pengguna sistem dan pengaruh organisasional.

1). Dimensi Pengguna Sistem

Pemerintah desa selaku pengguna sistem mendapatkan manfaat dari sistem keuangan desa untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desanya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dapat memberikan manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelolaa keuangan desa.

2). Dimensi Pengaruh Organisasi

Pemerintahan Desa sebagai sebuah organisasi yang dituntut untuk dapat mengelola keuangannya, yang memiliki pengaruh sangat besar dan bertanggung jawab terhadap kemajuan desanya serta kesejahteraan masyarakatnya harus dapat memanfaatkan sistem yang ada dengan sebaik-baiknya. Sistem keuangan desa menjadi alat bagi desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang lebih akurat, terintegrasi dan terkomputerisasi akan dapat meminimalkan tindak penyimpangan dan kecurangan sehingga akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan desanya.

2.1.4.3 Karakteristik Akuntansi Desa

Karakteristik penting akuntansi meliputi:

1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.
2) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
3) Informasi keuangan terkait suatu entitas.
4) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam proses pengambilan keputusan

2.1.4.4 Aspek-Aspek Akuntansi Desa

Aspek akuntansi desa meliputi : (IAI-KASP, 2015:6)

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada entitas (misalnya pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas yang dapat dimanfaatkan bagi pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.14.5 Indikator Sistem Keuangan Desa

Variabel Sistem Keuangan Desa dijabarkan dalam indikator:

1 Kemudahan dalam penggunaan

2 Resiko

3 Fitur layanan

4 Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi (Arfiansyah, 2020).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian disingkat menjadi SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP sebagai pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari:

1) **Lingkungan pengendalian**

   Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

   a) Penegakan integritas dan nilai etika.
   b) Komitmen terhadap kompetensi.
   c) Kepemimpinan yang kondusif.
   d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
   e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
   f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
   g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
   h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
   i) Penilaian risiko

2) **Penilaian resiko**

   Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah

menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3) kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.

f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan meyatu dan menjadi bagian intergral dari kegiatan instansi pemerintah. Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal yang telah dipraktikan dilingkungan

pemerintahan di berbagai Negara sebagaimana yang juga telah digunakan dalam penelitian (Arfiansyah, 2020) yang meliputi:

1. lingkungan pengendalian
2. penilaian risiko
3. kegiatan pengendalian
4. informasi dan komunikasi
5. pemantauan pengendalian intern

2.1.6 Peran Perangkat Desa

2.1.6.1 Pengertian Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa memiliki arti seberapa jauh keikut sertaan atau keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa.

2.1.6.2 Struktur Perangkat Desa

Menurut Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Perangkat Desa terdiri atas:

a. Sekretariat Desa
b. Pelaksana kewilayahan, dan

c. Pelaksana teknis

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf secretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desaserta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

2.1.6.3 Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan

Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, kepala desa bertindak dalam:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- menetapkan PPKD
- menyetujui DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, SPP

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak sebagai koordinir Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan melakukan verifikasi.

3) Kaur dan Kasi

kaur dan kasi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai bidamg tugasnya, menandatangani perjanjian kerja, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

4) Kaur Keuangan

Kaur keuangan menjalankan fungsi kebendaharaan seperti menyusun RAK Desa, menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Perangkat Desa dituntut mampu mengelola dan mengembangkan

masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis

2.1.6.4 Indikator Peran Perangkat Desa

Berdasarkan penelitian (Nandea, 2019) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel peran perangkat desa adalah :

1. Keterlibatan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.
2. Keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa
3. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran.
4. Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan keuangan desa.
5. Ikut serta melakukan audit partisipatif.

2.2 Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Akuntabilitas dalam pandangan Islam termuat dalam konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, bertindak secara bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

Dalam prakteknya, akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan konsep kepemilikan.

Al-Qur'an Surat Thaha ayat 6:

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ

Artinya: *Milik-Nya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada diantara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.*

Melalui surat ini dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat orang yang dipercaya untuk mengelolanya lebih memperhatikan kepentingan sosial karena harta yang dikelolanya bukanlah miliknya secara pribadi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

Kemudian, perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan sikap adil dijelaskan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

Q.S An-Nisa ayat 58

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *Sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Ayat ini dijadikan landasan dalam bekerja yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya. Dalam hal pengelolaan keuangan oleh pemerintah, surat ini menjelaskan bahwa amanah yang diberikan kepada pemerintah harus benar-benar dijalankan dan dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan sosial.

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah benar-benar berdasarkan keadaan yang rill atau keadaan yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang ditutup-tutupi apalagi dimanupulasi. Semuanya diharapkan berlandaskan kejujuran, keadilan, nilai-nilai syariah dan kepentingan sosial. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui atas penerimaan dan penggunaan anggaran tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mufti Arief Afriansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel bebas yang digunakan adalah Sistem keuangan Desa dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah. Variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas

				pengelolaan dana desa.
2.	Fifit Nur Walyati & Farida (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)	Variabel bebas yang digunakan adalah Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal. Variabel terikat yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Putu Ayu Ratih Ardianti dan I Wayan Suartana (2020)	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel bebas yang digunakan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa. Variabel terikat yang digunakan yaitu Akuntabilitas pengelolaan Dana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas

			Desa.	pengelolaan dana desa.
4.	Lusi Elviani Rangkuti dan Dwi Novasari (2019)	PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan)	Variabel bebas yang digunakan adalah peran perangkat desa. Variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa.
5.	Novia Syahputri Saragih dan Denny Kurnia (2019)	PENGARUH PERANGKAT DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN SERANG	Variabel bebas yang digunakan adalah perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa. Variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

6.	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yulliarti, Dania Puspitasari (2018)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Variabel bebas yang digunakan adalah Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal. Variabel terikat yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
7.	Novindra Dwi Seiana dan Nur Layla Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman dan peran perangkat desa. Variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

8.	Neny Try Indrianasari (2017)	PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO)	Variabel bebas yang digunakan adalah peran perangkat desa. Variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangn desa.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam seluruh pengelolaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri no. 113 2014.
9.	Tuti Amalya, Akram dan Endar Pituringsih (2017)	*Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability in West Lombok Regency*	Variabel bebas yang digunakan yaitu *Village Apparatur Capacity, Organization Commitment dan Implication of village financial sistem* (Siskeudes). Variabel terikat yang digunakan adalah *Accountability*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas administrasi desa berpengaruh negatif terhadappengelolaan keuangan desa, komitmen organisasi berpengaruh positif dan penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadp akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah Tahun 2021

2.4 Kerangka Pemikiran

Didasarkan dari landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut:

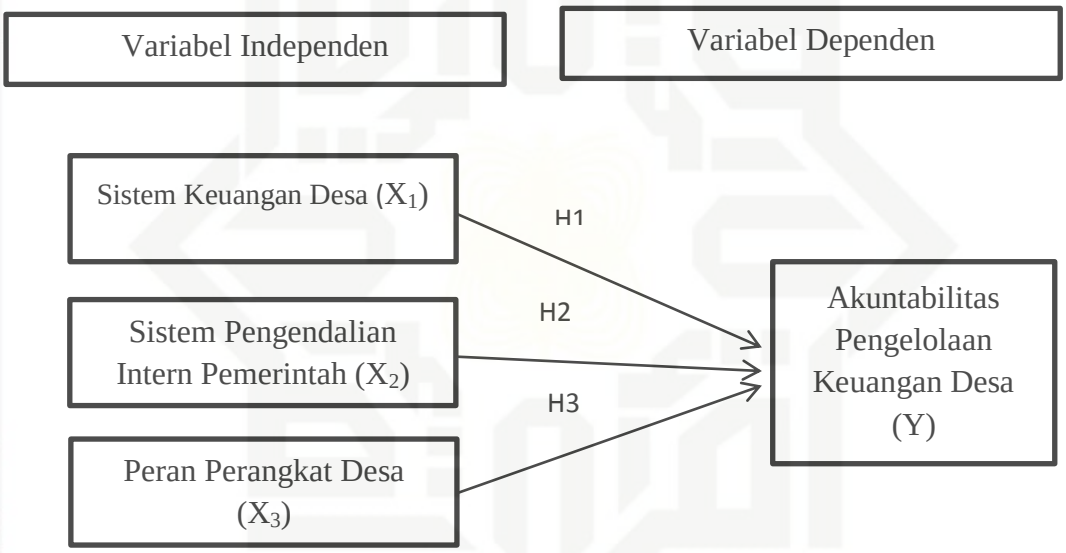

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori, yang kebernarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris (Chandrarin, 2018).

2.5.1 Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan

pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa.

Adanya sistem keuangan desa yang dijalankan dengan transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggran akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih maksimal.

Dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (siskeudes) diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan desa yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas baik dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, agar mampu mempertanggungjawabkan dana atau anggaran keuangan desa yang digunakan. penerapan sistem keuangan desa dapat memudahkan pemerintah desa dalam melakukan berbagai pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sistem keuangan yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintah desa. Penerapan sistem keuangan desa yang baik dapat memudahkan proses pengelolaan keuangan desa serta dapat menjadi alat pengendalian untuk mencegah adanya potensi kecurangan. Semakin baik sistem keuangan desa, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan desanya.

Penelitian sebelumnya oleh (Arianti & Suartana, 2020) menyatakan bahwa Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Arfiansyah, 2020) meyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai terkait pelaporan pengelolaan kekuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pengawasan untuk mencapai penggelolaan keuangan yang akuntabel. Implementasi SPIP di lingkungan instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk adanya proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Implementasi SPIP bertujuan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas.

Penelitian oleh (walyati & farida, 2020) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Interal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yesinia et al., 2018), (Martini, 2019), dan penelitian oleh (Widyatama et al., 2017) yang menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

2.5.3 Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Perangkat desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Perangkat Desa yang professional sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya. Dengan demikian, perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang telah ditetapkan serta per undnag-undangan yang berlaku agar tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa yang mampu menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan yang baik, memahami tugas pokok, terlibat dalam perencanaan dan penganggaran serta keuangan desa serta mampu menyusun laporan keuangan desa serta mampu metauhi norma-norma yang berlaku mengupayakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,

Perangkan desa yang dapat menjalankan perannya dengan baik dan mampu bekerja secara professional akan memberikan pengaruh yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya.

Penelitian sebelumnya oleh (Rangkuti & Novasari, 2019) membuktikan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Setiawan & Yuliani, 2017) membuktikan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Saragih & Kurnia, 2019), (Yesinia et al., 2018), menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa dengan fokus pada penerapan sistem keuangan desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi dari diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Waktu Penelitian adalah tahun 2021.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematik, faktual dan akurat berdasarkan hitungan matematis mengenai pengaruh penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Batang Tuaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Perangkat Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Sampel menurut (Sugiyono, 2015) adalah bagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas:
    a. Sekretaris Desa
    b. Kaur

       Kaur terdiri atas Kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, dan kaur perencanaan.
    c. kasi

       Kasi terdiri dari Kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka terdapat 8 orang sampel penelitian dari masing-masing desa.

Tabel 3.1
Daftar Desa yang menjadi sampel penelitian

No	Nama Desa	Pengelola keuangan Desa berdasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018				
		Kepala desa	Sekretaris Desa	Kaur	Kasi	Total sampel/desa
1	Kuala Sebatu	1	1	3	3	8
2	Sungai Raya	1	1	3	3	8
3	Sungai Junjangan	1	1	3	3	8
4	Sungai Luar	1	1	3	3	8
5	Sungai Dusun	1	1	3	3	8
6	Tanjung Siantar	1	1	3	3	8
7	Sungai Raya	1	1	3	3	8
8	Sialang Jaya	1	1	3	3	8
9	Gemilang Jaya	1	1	3	3	8
10	Tasik Raya	1	1	3	3	8
11	Pasir Emas	1	1	3	3	8
12	Simpang Jaya	1	1	3	3	8
Jumlah		12	12	36	36	
Jumlah Keseluruhan Sampel			**96**			

Sumber : Data yang diolah tahun 2021

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan.

1. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner *(quistionnare)* adalah desain pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran & Bougie, 2017). Kuisioner yang digunakan diuji menggunakan uji Validitas dan uji Reliabilitas.
2. Studi Kepustakaan, adalah bentuk penelitian yang bersifat teoritis yang mempelajari literature-literatur, pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.5 Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran perangkat Desa sebagai variabel Independen dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel Dependen.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD.	1. perumusan rencana keuangan, 2. pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, 3. melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, 4. pelaksanaan pelaporan keuangan Sumber: (Arfiansyah, 2020)	Skala Likert

Sumber: Penelitian Mufti Arief Arfiansyah 2020

Tabel 3.3
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Sistem Keuangan Desa (X_1)	Sistem keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa.	1. kemudahan dalam penggunaan 2. resiko 3. fitur layanan 4. pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi Sumber: (Arfiansyah, 2020)	Skala Likert

2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2)	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan Pengendalian. 2. Penaksiran risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Komunikasi dan Informasi 5. Pemantauan Sumber: (PP No.60 Tahun 2008) dalam (Arfiansyah, 2020)	Skala Likert
3.	Peran Perangkat Desa (X_3)	Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang	1. Keterlibatan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. 2. Keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa 3. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran. 4. Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan keuangan desa.	Skala Likert

		diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa dituntut mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.	5. Ikut serta melakukan audit partisipatif. Sumber: (Nandea, 2019)	

3.6 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang menganalisa dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2015). Statistik deskriptif dilakukan terhadap data penelitan dan responden. Deskripsi data penelitian meliputi hasil jawaban responden dari instrument penelitian yang telah disebarkan. Sedangkan deskripsi data responden meliputi jenin kelamin, Jabatan fungsional dan pendidikan terakhir**.**

3.7 Matode Analisis Data *SEM-PLS*

Pada penelitian ini digunakan analisis *Structural Equation Modeling* berbasis – *Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan alat analisis data *SmartPLS 3.0*. Model persamaan struktural (*SEM*) merupakan suatu teknik analisis multivariat yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan endogen multipel dengan banyak faktor.

Penelitian ini menggunakan 1 variabel endogen (variabel dependen) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan 3 variabel eksogen (variabel independen) yaitu Sistem keuangan desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Perangkat Desa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator reflektif, sehingga arah hubungan kausalitas berasal dari konstruk menuju ke indikator.

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari :

1. Merancang model Pengukuran (*Outer Model*), sering disebut juga (*outer relation atau measurement model)* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya.
2. Merancang model Struktural yang disebut juga dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square*.
3. Mengkonstruksi diagram jalur, dalam menggambar diagram jalur (*path diagram*) Falk dan Miller (1992) merekomendasi untuk menggunakan prosedur nomogram *reticular action modeling (RAM*) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Konstruk teoritikal (*theoretical constructs*) yang menunjukkan varibel laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips (*circle*).
   b. Variabel *observed* atau indikator harus digambar dengan bentuk kotak (*squares*).
   c. Hubungan-hubungan asimetri (*asymmetrical relationships*) digambarkan dengan arah panah tunggal (*single headed arrow*).

d. Hibungan-hubungan simetris (*symmetrical relationship*) digambarkan dengan arah panah double (*double headed arrow*).

4. Melakukan Estimasi. Estimasi parameter pemodelan *SEM* dengan pendekatan *PLS* diperoleh melalui proses literasi tiga tahap yaitu sebagai berikut :
   a. Tahap pertama, menentukan estimasi bobot *(weight estimate*) untuk menetapkan skor atau menghitung data variabel laten.
   b. Tahap kedua, menentukan estimasi jalur (estimasi untuk *inner dan outer model)* yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.
   c. Tahap ketiga, menentukan estimasi rata-rata dan lokasi parameter untuk indikator dan variabel laten.
5. Melakukan evaluasi *goodness of fit*. Evaluasi *goodness of fit* model struktural diukur dengan melihat nilai koefisien parameter dan melihat nilai R yang diperoleh pada setiap variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. (Ulum et al, 2014).
6. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menguji hubungan antar variabel.

3.7.1 *Uji Outer Model* atau Model Pengukuran

Model pengukuran (*measurement model* atau *outer model)* menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur (Ghozali & Latan, 2019). Uji *outer model* digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kriteria yang digunakan untuk menilai *outer model* antara lain adalah Uji *validitas convergent, uji validitas discriminant* dan uji *reliabilitas.*

3.7.1.1 Uji Validitas Covergent

Uji *validitas convergent* dari *measurement (outer)* model digunakan untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-masing konstruk. *Validitas convergent* dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan korelasi antara item *score* atau *component* dengan *construct score* yang dihitung dengan *PLS*. Uji *validitas convergent* indikator reflektif dengan program *SmartPLS* 3.0 dapat dilihat dari *loading factor* dan *Average Variance Extracted (AVE).*

3.7.1.1.1 Loading Factor

Nilai *loading factor* menjadi kriteria dalam menilai *validitas convergent*. Jika dilihat dari *loading factor* maka ukuran model reflektif dikatakan bagus apabila nilai *loading factor* lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2019).

3.7.1.1.2 Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) merupakan salah satu paramater untuk menilai *validitas convergent*. Variabel laten dikatakan valid jika nilai *AVE* harus lebih dari 0,5. Nilai *AVE* direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti bahwa 50% atau lebih *variance* dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali & Latan, 2019).

3.7.1.2 Uji Discriminant Validity

Discriminant Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manivest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara mengukur validitas diskriminan dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* setiap variabel. Suatu indikator dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik apabila nilai *cross loading* indikator

terhadap variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2019).

3.7.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. SEM-PLS menggunakan program *SmartPLS*, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2019).

3.7.2 *Uji Inner Model* atau Model Struktural

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Penilaian model dengan *PLS*, dapat dimulai dengan melihat *R-square* untuk variabel laten dependen.

Model struktural atau *inner model* merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah.

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coeffisient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai t-hitung. Signifikan parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai $t\text{-}_{hitung}$ dengan nilai $t\text{-}_{tabel}$. Uji hipotesisi menggunakan analisis *SEM-PLS* dengan aplikasi *SmartPLS* 3.0 dengan metode *resampling bootstrapping*. Nilai signifikan yang digunakan (*two-tailed*) $t\text{-}_{tabel}$ 1,65 (*significance level* =10%), $t\text{-}_{tabel}$ 1,96 (*significance level* =5%), $t\text{-}_{tabel}$ 2,58 (*significance level* =1%) (Ghozali & Latan, 2019).

Penelitian ini dengan tingkat keyakinan 95% atau taraf signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5% ($t\text{-}_{tabel}$ 1,96) dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila nilai $t\text{-}_{hitung}$ lebih besar dari $t\text{-}_{tabel}$ ($t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ 1,96), maka Ho ditolak dan Ha diterima, menandakan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2) Apabila nilai $t\text{-}_{hitung}$ lebih kecil dari $t\text{-}_{tabel}$ ($t\text{-}_{hitung} < t\text{-}_{tabel}$ 1,96) maka Ho diterima dan Ha ditolak, menandakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran perangkat desa, terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan motode *Structural Equation Model - Partial Least Square* (*SEM-PLS)* menggunakan program *SmartPLS3*.0.

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem keuangan desa yang dijalankan dengan transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran akan memudahkan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sehingga pencatatan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat serta dapat menjadi alat pengedalian untuk

mencegah adanya kecurangan, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, karena pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dapat dijadikan sebagai pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sehingga diterapkan ataupun tidaknya sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Perangkat Desa yang professional sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya. Dengan demikian, perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang telah ditetapkan serta per undnag-undangan yang berlaku agar tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dan sumbang pemikiran penulis berikut semoga bermanfaat bagi pembaca serta untuk kesempurnaan penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan oleh inspektorat maupun BPD untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran.
2. Diharapkan pemerintah desa secara rutin mendapat bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan desa.
3. Bagi pemerintah desa di wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan secara rutin memberikan informasi dana desa, laporan keuangan desa dan hasil kerja dalam hal pengelolaan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban kepada publik agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui tetntang pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini dan memperluas objek penelitian, pernyataan dalam kuesioner disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi multitafsir, peneliti juga dapat mengembangkan penelitian dengan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan Surat An-Nisa ayat 58.

Al-Qur'an dan terjemahan Surat Thaha ayat 6.

Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS-Indonesian Journal On Information Syste.*, Hal. 69-76 https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50

Amalya, Tuti, A. dan Pituringsih., E. (2017). Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability : Study on Village Governance in West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*. Vol.5, No.12.

Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting.*Vol. 3 No. 1.

Ardianti, Putu Ayu Ratih & Suartana, I Wayan. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 30 No. 11.

Chandrarin, Grahita. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta: Salemba Empat.

Databoks.Katadata.co.id. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020 (Diakses pada 30 September 2020, 11:10 WIB)

Ghozali, I., & Latan, H. (2019). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*. Vol.1, No. 2.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 tahun 2014)

Kompas.com. (2020). Catatan ICW Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada2019.https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019 (Diakses pada 18 Februari 2020, 19:08 WIB) .

Martini, R., Lianto, N,. Hartati, S., Zulkifli, & Widyastuti, E (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ataas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol. 2 No. 1, 2019 Hal. 106-123.

Merdeka.com. (2018). Mantan Kades dan Sekdes di Inhil Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta. https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html (Diakses pada 7 November 2018 11:26 WIB)

Nandea. F. A. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan demak). *Skripsi*. Universitas Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Pemerintah Desa (SOTK)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.

Putri, Melisha N, F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Rangkuti, Lusi Elviani & Dwi Novasari. (2019). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Wahana Inovasi*. Vol.8, No. 2.

Republika.co.id. (2019). KPK Duga Desa Fiktif Terjadi di Banyak Daerah. https://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/11/13/q0vxw6385-kpk-duga-desa-fiktif-terjadi-di-banyak-daerah (Diakses pada 13 November 2019, 09:07 WIB)

Riauonline.co.id. (2020). 18 Kepala Desa di Indragiri Hilir dilaporkan ke Kejati Riau, Soal Dana Desa? https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/05/20/18-kepala-desa-di-indragiri-hilir-dilaporkan-ke-kejati-riau-soal-dana-desa (Diakses pada 20 Mei 2020 13:34 WIB)

Santoso. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah. *Tesis*. Universitas Lampung. Lampung.

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Juma Unsera*.

Sekaran, U., & Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian.* Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Novindra. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Urecol*. Universitas Muhamadiyah Magelang.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. 02, No.02.

Wulandari, Sischa. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*. Vol. 8 No. 4.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntasi Riset)*. 10 (01) Hal. 105-112.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas skripsi saya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi yang berjudul "PEGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PEGENDALIAN INTEN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TEHADAP AKUNTABILITAS PEGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)".

Berkaitan dengan penelitian tesebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk megisi kuesioner ini dalam bentuk informasi yang benar sesuai yang dialami. Sesuai dengan kode etik penelitian saya akan mejaga kerahasiaan data yang responden berikan, hal ini semata-mata untuk kepetingan ilmiah diamana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan.

Akhir kata saya megucapkan teimakasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pegisian kuesioner ini.

Hormat saya

Meysa Khalifa
NIM. 11773201122

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk melengkapi daftar isian yang tedapat dibawah ini.

I. Identitas Responden

Nama Lengkap : ……

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Desa tempat bekerja :……

Jabatan : ☐ Kepala Desa ☐ Kasi pemerintahan
☐ Sekretaris Desa ☐ Kasi Kesejahteraan
☐ Kaur Tata usaha dan umum ☐ Kasi Pelayanan
☐ Kaur Perencanaan ☐ Kaur Keuangan

Tingkat Pendidikan : ……

II. Petunjuk Pegisian

Berikut adalah daftar pernyataan tentang penelitian Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Bapak / Ibu / Saudara / I cukup memilih pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu / Saudara / I dengan skala dari 1 sampai 5.

Keterangan:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

III. Persepsi Responden

SISTEM KEUANGAN DESA						
No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Aplikasi Siskeudes mudah digunakan dan dipahami.					
2.	Aplikasi Siskeudes meringankan beban pekerjaan dalam pembuatan laporan keuangan desa.					
3.	Penggunaan aplikasi Siskeudes mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan desa.					
4.	Aplikasi Siskeudes menghilangkan resiko penyimpangan dan menghindarkan dari manipulasi pertanggungjawaban belanja desa.					
5.	Aplikasi Siskeudes memiliki fitur-fitur layanan lengkap sesuai kebutuhan desa.					
6.	Aplikasi Siskeudes sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa.					
7.	Aplikasi Siskeudes memiliki pembaruan yang berkelanjutan.					
8.	Aplikasi Siskeudes dimanfaatkan secara benar dan digunakan secara berkala dan berkesinambungan.					
9.	Aplikasi Siskeudes digunakan secara terbuka dan akuntabel.					
10.	Aplikasi Siskeudes menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.					

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)						
No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang.					
2.	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi, tugas dan wewenang yang jelas.					
3.	Aset milik desa selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					
4.	Memiliki rencana pengelolaan dalam mengurangi resiko pelanggaran.					

5.	Pengeluaran uang pada pemerintahan desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran pada bukti pengeluaran kas.					
6.	Adanya otorisasi atas aktivitas transaksi.					
7.	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.					
8.	Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh inspektorat atau BPD.					
9.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan anggaran desa secara berkala dan berkesinambungan.					

PERAN PERANGKAT DESA						
No	**Pernyataan**	**Jawaban**				
		STS	**TS**	**N**	**S**	**SS**
1.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses perencanaan penggunaan keuangan desa.					
2.	Perangkat desa terkait memberikan mesukan tentang rancangan APBDesa kepada Kepala Desa dan /atau BPD.					
3.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.					
4.	Perangkat desa terkait menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapakan dalam Perdes tentang APBDesa.					
5.	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang perubahan APBDesa.					
6.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa.					
7.	Perangkat desa terkait memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif.					

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA						
No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa.					
2.	Pembuatan RKP-Desa mengutamakan kepentingan publik dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran.					
3.	Pengajuan anggaran disertai dokumen perencanaan yang diajukan sebagai dasar penyusunan APB Des.					
4.	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, efisisien dan sesuai peraturan perundang-undangan.					
5.	Evaluasi kinerja keuangan memperhatikan prinsip ekonomis, efektifn dan efisien dari setiap program.					
6.	Pencatatan pendapatan, belanja dan pembiayaan didasarkan pada kelengkapan bukti/dokumen pelaksanaan anggaran.					
7.	Pelaporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					
8.	Laporan keuangan desa diperiksa oleh inspektorat dan pemerintah desa melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran.					

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Kuesioner Sistem Keuangan Desa

	Sistem Keuangan Desa										
Res	SAKD.1	SAKD.2	SAKD.3	SAKD.4	SAKD.5	SAKD.6	SAKD.7	SAKD.8	SAKD.9	SAKD.10	Total
1	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
7	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	46
8	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
14	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	45
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
17	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	40
18	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42
19	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38
20	4	5	5	4	4	4	3	4	3	4	40
21	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	39
22	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4	41
23	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	41
24	4	4	4	4	3	4	5	5	3	4	40
25	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
26	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
27	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
28	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
30	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
31	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
40	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
41	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	47
42	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	47
43	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
44	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
45	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
46	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
47	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	43
48	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	43
49	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
50	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
51	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
52	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	45
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
56	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
61	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
62	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
63	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	45
64	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
66	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
68	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
69	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	46
70	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
71	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
73	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
74	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
76	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
77	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48

78	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
79	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	47
80	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	47
81	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
82	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
83	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
84	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
85	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
86	5	5	5	5	5	5	7	5	5	5	52
87	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
88	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
89	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	47
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

LAMPIRAN 3
Tabulasi Data Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah										
Res	SPIP.1	SPIP.2	SPIP.3	SPIP.4	SPIP.5	SPIP.6	SPIP.7	SPIP.8	SPIP.9	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	36
4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	39
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
6	4	5	5	4	5	4	4	4	5	40
7	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
8	4	5	5	4	5	4	4	4	4	39
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	5	5	4	4	5	5	5	4	4	41
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	5	4	5	5	5	4	40
15	4	5	4	4	4	3	4	4	4	36
16	5	5	5	5	5	5	4	4	5	43
17	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
18	3	3	5	4	5	4	4	4	5	37
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	3	5	4	4	4	4	4	5	5	38
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

22	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
23	3	5	4	4	5	4	4	5	5	39
24	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
25	4	4	5	4	4	5	5	5	5	41
26	4	4	5	4	4	5	5	5	5	41
27	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
28	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
29	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
31	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	5	5	4	4	5	43
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
39	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	4	5	5	4	5	4	4	5	5	41
42	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
43	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
45	5	5	5	4	5	5	4	5	5	43
46	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
47	5	5	5	4	5	4	4	4	5	41
48	4	5	4	5	5	4	5	4	5	41
49	5	5	5	5	5	6	5	4	5	45
50	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
51	4	5	5	3	5	4	4	4	4	38
52	4	5	5	4	5	5	4	4	5	41
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
54	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
62	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43

63	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
69	5	4	4	5	5	4	5	5	4	41
70	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
71	5	5	5	4	4	4	5	4	5	41
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
74	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
79	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
80	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

LAMPIRAN 4
Tabulasi Data Kuesioner Peran Perangkat Desa

	Peran Perangkat Desa							
Res	PPD.1	PPD.2	PPD.3	PPD.4	PPD.5	PPD.6	PPD.7	Total
1	5	5	5	5	5	5	4	34
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	5	5	4	4	4	4	4	30
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	5	5	5	31
15	4	4	4	5	4	5	3	29
16	4	4	5	5	5	4	4	31
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	5	5	4	4	4	30
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	3	4	4	4	4	4	27
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	4	4	4	4	4	4	29
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	4	5	5	5	5	4	33
26	5	4	5	4	4	5	4	31
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	5	5	5	4	34
29	5	4	5	5	5	5	4	33
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	5	5	5	5	5	4	34
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	5	5	5	5	4	4	33
34	5	5	5	5	5	5	4	34
35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	5	5	5	5	5	5	5	35

37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	5	5	5	5	5	5	4	34
40	5	5	5	5	5	5	4	34
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	5	5	4	4	4	4	4	30
43	5	5	5	5	5	4	4	33
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	5	4	5	4	4	5	4	31
46	5	5	5	4	5	5	4	33
47	5	4	5	5	5	5	4	33
48	5	5	4	5	5	5	4	33
49	4	5	4	5	4	4	4	30
50	5	5	5	4	5	5	5	34
51	5	4	4	4	5	4	5	31
52	5	5	4	5	5	5	4	33
53	5	5	5	5	5	5	4	34
54	5	5	5	5	5	5	4	34
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	5	5	5	5	5	5	4	34
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	5	5	5	5	5	5	4	34
59	5	4	5	5	4	5	4	32
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	5	5	5	5	5	5	4	34
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	4	5	5	5	5	4	33
64	4	4	4	4	4	4	4	28
65	5	4	4	4	4	4	4	29
66	5	4	5	5	4	5	4	32
67	5	5	5	5	5	5	5	35
68	5	4	5	5	4	5	4	32
69	4	5	4	4	5	5	4	31
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	5	4	4	4	4	5	4	30
72	5	5	5	5	5	5	4	34
73	5	5	5	5	5	5	5	35
74	5	4	5	5	4	5	4	32
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	4	4	5	5	5	5	5	33

78	5	5	5	5	5	5	4	34
79	5	4	5	5	5	5	4	33
80	5	4	5	5	4	5	4	32
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	5	5	5	5	5	5	4	34
83	5	4	5	5	5	5	5	34
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	5	5	5	5	5	5	4	34
87	5	5	5	5	5	5	4	34
88	4	4	4	4	4	4	4	28
89	5	5	5	5	4	5	5	34
90	5	5	5	5	5	5	5	35

LAMPIRAN 5

Tabulasi Data Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa									
Res	APKD.1	APKD.2	APKD.3	APKD.4	APKD.5	APKD.6	APKD.7	APKD.8	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	4	4	4	5	5	5	4	36
3	4	5	4	4	4	4	5	4	34
4	4	4	4	4	4	4	5	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	4	4	4	4	5	4	5	34
8	4	5	4	4	4	5	4	5	35
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	5	5	5	4	4	4	4	4	35
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	5	4	5	5	4	5	36
15	4	4	4	3	3	4	5	4	31
16	4	4	4	4	4	4	4	5	33
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	4	4	5	5	5	4	4	4	35
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	5	4	4	4	4	4	33
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32

23	4	4	4	4	4	5	5	4	34
24	4	5	4	4	4	4	4	4	33
25	5	5	5	5	4	5	5	4	38
26	5	5	5	5	5	5	5	4	39
27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
28	5	5	5	5	5	5	5	4	39
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
30	5	5	5	5	5	5	5	4	39
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	5	5	5	5	5	5	5	5	40
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	5	5	5	5	5	5	5	40
39	5	4	5	5	5	5	5	5	39
40	5	5	5	5	5	5	5	4	39
41	5	5	4	4	4	5	5	5	37
42	4	5	4	5	4	4	5	4	35
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	4	5	5	5	4	4	5	5	37
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
46	5	4	4	5	4	5	5	4	36
47	5	4	4	5	4	4	5	4	35
48	4	5	4	4	4	5	5	4	35
49	5	4	4	5	4	4	5	5	36
50	5	4	4	5	4	5	5	4	36
51	5	5	4	5	4	5	5	4	37
52	5	5	5	4	4	4	5	4	36
53	5	5	5	5	5	5	5	4	39
54	5	5	5	5	5	5	5	4	39
55	4	4	4	4	4	4	4	3	31
56	5	5	5	5	5	5	5	4	39
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	5	5	5	5	5	5	5	4	39
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	4	4	4	4	4	4	4	3	31
61	5	5	5	5	5	5	5	5	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	5	5	5	5	5	5	5	4	39

64	4	4	4	4	4	4	5	4	33
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	5	5	5	5	5	5	5	4	39
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40
68	5	5	5	5	5	5	5	4	39
69	4	4	5	4	5	5	5	4	36
70	5	5	5	5	5	5	5	4	39
71	4	5	4	5	5	5	5	5	38
72	5	5	5	5	5	5	5	5	40
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40
74	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	4	5	5	5	5	5	5	5	39
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	4	5	5	5	5	4	5	5	38
79	5	5	5	5	5	5	5	4	39
80	5	5	5	5	5	5	5	4	39
81	5	5	5	5	5	5	5	4	39
82	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40
84	5	5	5	5	5	5	5	5	40
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	5	5	5	5	5	5	5	4	39
87	4	5	4	5	5	4	5	5	37
88	4	4	4	4	4	4	5	4	33
89	5	5	5	5	5	5	5	4	39
90	5	5	5	5	5	5	5	5	40

LAMPIRAN 6
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	96	100%
Kuesioner yang terisi	90	94%
Kuesioner yang tidak terisi	6	6%
Kuesioner yang dapat diolah	**90**	**94%**

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

LAMPIRAN 7
Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	**Jenis Kelamin**		
	a. Laki-laki	64	71.11%
	b. Perempuan	26	28.89%
	Jumlah	**90**	**100%**
2	**Tingkat Pendidikan**		
	a. SMA/SMK/MA	47	52.22%
	b. D2	2	2.22%
	c. D3	4	4.44%
	d. S1	37	41.11%
	Jumlah	**90**	**100%**
3	**Jabatan**		
	a. Kepala Desa	12	13.33%
	b. sekretaris Desa	12	13.33%
	d. Kaur	33	36.67%
	e. Kasi	33	36.67%
	Jumlah	**90**	**100%**

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

LAMPIRAN 8

Uji Validitas Convergent

Outer Loading (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
APKD.1 <-APKD	0.835	0.831	0.043	19.624	0.0000
APKD.2 <-APKD	0.817	0.818	0.045	18.209	0.0000
APKD.3 <-APKD	0.838	0.838	0.042	19.860	0.0000
APKD.4 <-APKD	0.875	0.877	0.025	35.436	0.0000
APKD.5 <-APKD	0.869	0.870	0.027	31.788	0.0000
APKD.6 <-APKD	0.828	0.825	0.047	17.684	0.0000
APKD.7 <-APKD	0.765	0.764	0.059	12.974	0.0000
APKD.8 <-APKD	0.571	0.567	0.078	7.269	0.0000
PPD.1 <- PPD	0.831	0.832	0.047	17.641	0.0000
PPD.2 <- PPD	0.753	0.752	0.054	13.851	0.0000
PPD.3 <- PPD	0.894	0.898	0.027	32.910	0.0000
PPD.4 <- PPD	0.856	0.857	0.040	21.304	0.0000
PPD.5 <- PPD	0.850	0.850	0.040	21.067	0.0000
PPD.6 <- PPD	0.870	0.872	0.036	24.287	0.0000
PPD.7 <- PPD	0.533	0.530	0.067	8.009	0.0000
SKD.1 <- SKD	0.559	0.549	0.075	7.433	0.0000
SKD.10 <- SKD	0.765	0.762	0.057	13.439	0.0000
SKD.2 <- SKD	0.778	0.774	0.061	12.669	0.0000
SKD.3 <- SKD	0.856	0.857	0.036	23.694	0.0000
SKD.4 <- SKD	0.797	0.798	0.051	15.670	0.0000
SKD.5 <- SKD	0.820	0.821	0.034	23.984	0.0000
SKD.6 <- SKD	0.761	0.763	0.062	12.343	0.0000
SKD.7 <- SKD	0.664	0.665	0.062	10.688	0.0000
SKD.8 <- SKD	0.768	0.766	0.060	12.740	0.0000
SKD.9 <- SKD	0.822	0.823	0.041	20.270	0.0000
SPIP.1 <- SPIP	0.782	0.787	0.039	19.913	0.0000
SPIP.2 <- SPIP	0.722	0.728	0.053	13.499	0.0000
SPIP.3 <- SPIP	0.732	0.735	0.057	12.832	0.0000
SPIP.4 <- SPIP	0.813	0.813	0.046	17650	0.0000
SPIP.5 <- SPIP	0.711	0.712	0.069	10.313	0.0000
SPIP.6 <- SPIP	0.810	0.812	0.040	20.477	0.0000
SPIP.7 <- SPIP	0.828	0.829	0.041	20.160	0.0000
SPIP.8 <- SPIP	0.787	0.786	0.051	15.369	0.0000
SPIP.9 <- SPIP	0.769	0.770	0.053	14.407	0.0000

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 9

Uji Validitas Convergent Run 2

Outer Loading (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sampel (O)	*Sampel Mean (M)*	*Standard Deviation (STDEV)*	*T Statistics*	*P Values*
APKD.1 <-APKD	0.852	0.850	0.037	22.791	0.0000
APKD.2 <-APKD	0.817	0.820	0.046	17.873	0.0000
APKD.3 <-APKD	0.843	0.844	0.040	21.025	0.0000
APKD.4 <-APKD	0.879	0.881	0.027	32.823	0.0000
APKD.5 <-APKD	0.868	0.871	0.029	29.512	0.0000
APKD.6 <-APKD	0.830	0.829	0.041	20.230	0.0000
APKD.7 <-APKD	0.773	0.771	0.059	13.124	0.0000
PPD.1 <- PPD	0.842	0.844	0.042	20.257	0.0000
PPD.2 <- PPD	0.747	0.747	0.056	13.225	0.0000
PPD.3 <- PPD	0.900	0.902	0.028	32.230	0.0000
PPD.4 <- PPD	0.871	0.874	0.036	23.923	0.0000
PPD.5 <- PPD	0.840	0.839	0.045	18.657	0.0000
PPD.6 <- PPD	0.877	0.881	0.036	24.648	0.0000
SKD.10 <- SKD	0.786	0.783	0.053	14.789	0.0000
SKD.2 <- SKD	0.773	0.770	0.062	12.377	0.0000
SKD.3 <- SKD	0.855	0.855	0.040	21.402	0.0000
SKD.4 <- SKD	0.803	0.802	0.052	15.335	0.0000
SKD.5 <- SKD	0.829	0.830	0.035	23.595	0.0000
SKD.6 <- SKD	0.782	0.783	0.058	13.471	0.0000
SKD.8 <- SKD	0.767	0.771	0.060	12.801	0.0000
SKD.9 <- SKD	0.833	0.833	0.039	21.149	0.0000
SPIP.1 <- SPIP	0.783	0.790	0.037	20.985	0.0000
SPIP.2 <- SPIP	0.721	0.725	0.053	13.698	0.0000
SPIP.3 <- SPIP	0.732	0.735	0.059	12.442	0.0000
SPIP.4 <- SPIP	0.813	0.817	0.044	18.536	0.0000
SPIP.5 <- SPIP	0.710	0.711	0.066	10.714	0.0000
SPIP.6 <- SPIP	0.809	0.811	0.041	19.553	0.0000
SPIP.7 <- SPIP	0.829	0.832	0.039	21.276	0.0000
SPIP.8 <- SPIP	0.788	0.789	0.049	16.006	0.0000
SPIP.9 <- SPIP	0.769	0.764	0.059	12.928	0.0000

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 10

Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.703
Sistem Keuangan Desa (X1)	0.646
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0.599
Peran Perangkat Desa (X3)	0.719

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

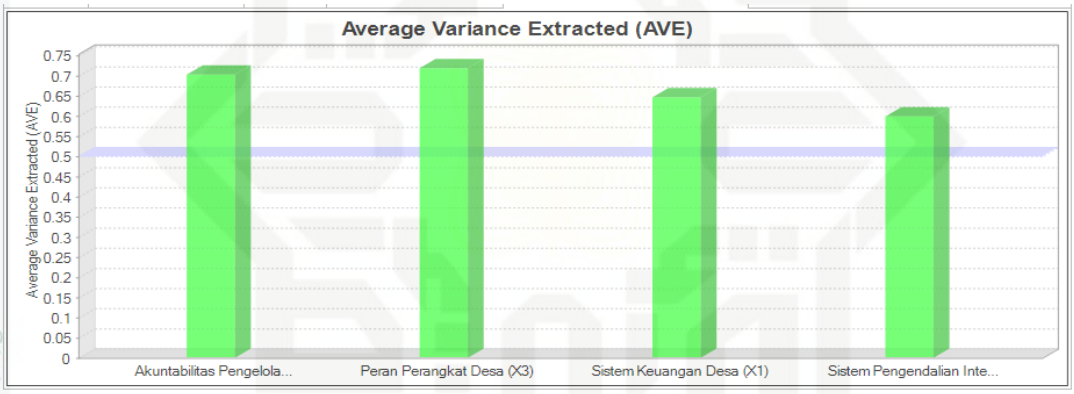

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 11

Discriminant Validity

	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Peran Perangkat Desa	Sistem Keuangan Desa	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
APKD.1	0.852	0.737	0.656	0.658
APKD.2	0.817	0.686	0.679	0.710
APKD.3	0.843	0.674	0.713	0.749
APKD.4	0.879	0.749	0.677	0.754
APKD.5	0.868	0.650	0.771	0.735
APKD.6	0.830	0.648	0.698	0.612
APKD.7	0.773	0.705	0.669	0.624
PPD.1	0.744	0.842	0.626	0.626
PPD.2	0.544	0.747	0.548	0.585
PPD.3	0.804	0.900	0.730	0.764
PPD.4	0.700	0.871	0.697	0.777
PPD.5	0.619	0.840	0.538	0.617
PPD.6	0.748	0.877	0.732	0.745
SKD.10	0.650	0.567	0.786	0.647
SKD.2	0.638	0.618	0.773	0.540
SKD.3	0.692	0.660	0.855	0.615
SKD.4	0.658	0.696	0.803	0.656
SKD.5	0.782	0.659	0.829	0.662
SKD.6	0.639	0.580	0.782	0.605
SKD.8	0.659	0.561	0.767	0.641
SKD.9	0.661	0.590	0.833	0.654
SPIP.1	0.678	0.614	0.666	0.783
SPIP.2	0.601	0.593	0.636	0.721
SPIP.3	0.730	0.716	0.624	0.732
SPIP.4	0.617	0.663	0.662	0.813
SPIP.5	0.506	0.613	0.455	0.710
SPIP.6	0.618	0.571	0.508	0.809
SPIP.7	0.682	0.640	0.600	0.829
SPIP.8	0.677	0.628	0.673	0.788
SPIP.9	0.591	0.608	0.575	0.769

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 12
Uji Reliabilitas
Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability*

	Cronbacth's Alpha	*rho-A*	*Composite Reliability*
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.929	0.930	0.943
Sistem Keuangan Desa (X1)	0.922	0.923	0.936
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0.916	0.919	0.931
Peran Perangkat Desa (X3)	0.921	0.931	0.939

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

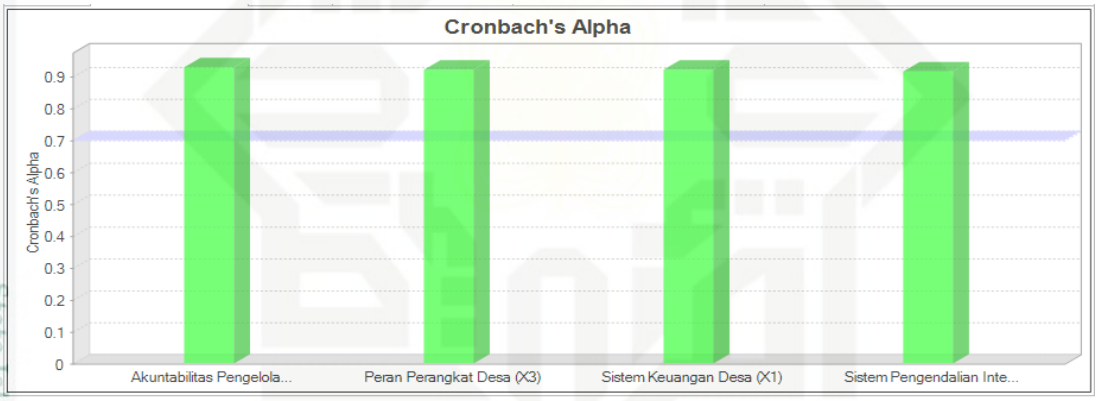

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

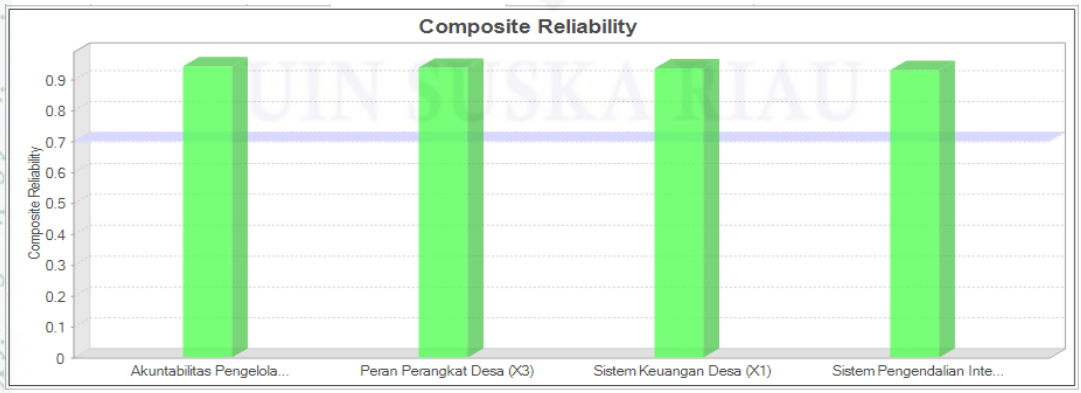

Sumber *: Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 13
Uji Inner Model
R Square

	R Square	*R Square Adjusted*
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.799	0.792

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

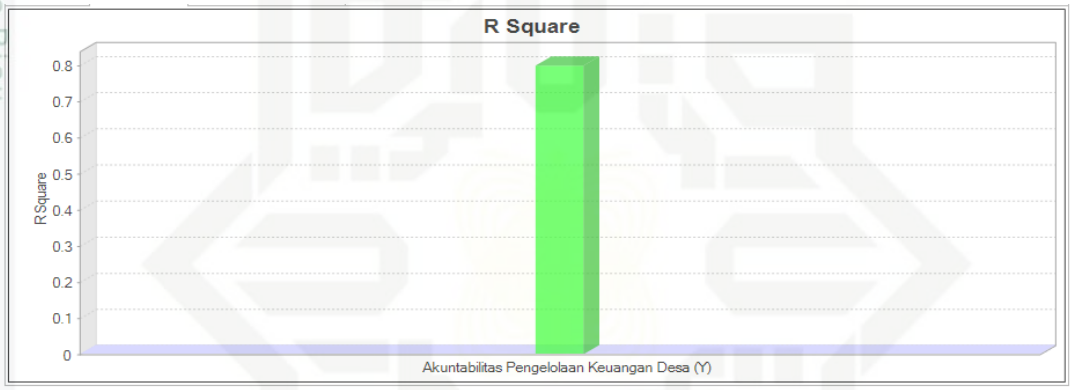

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 14
Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values
PPD (X3) -> APKD (Y)	0.312	0.306	0.124	2.518	0.012
SKD (X1) -> APKD (Y)	0.363	0.392	0.161	2.254	0.025
SPIP (X2) -> APKD (Y)	0.290	0.271	0.160	1.807	0.071

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 15

Full Model SEM PLS Algorithm

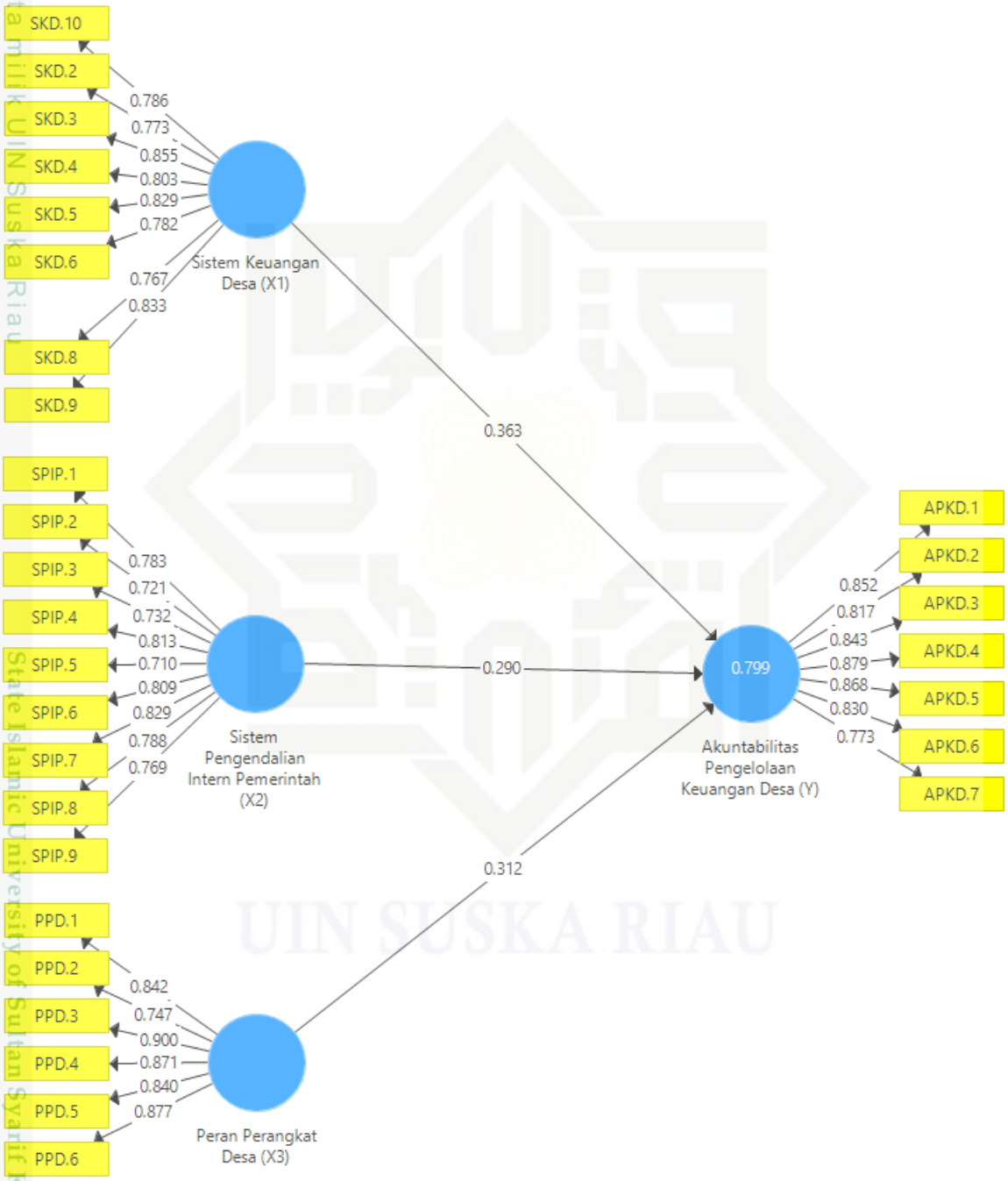

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, tahun 2021

LAMPIRAN 16
Uji Bootstrapping

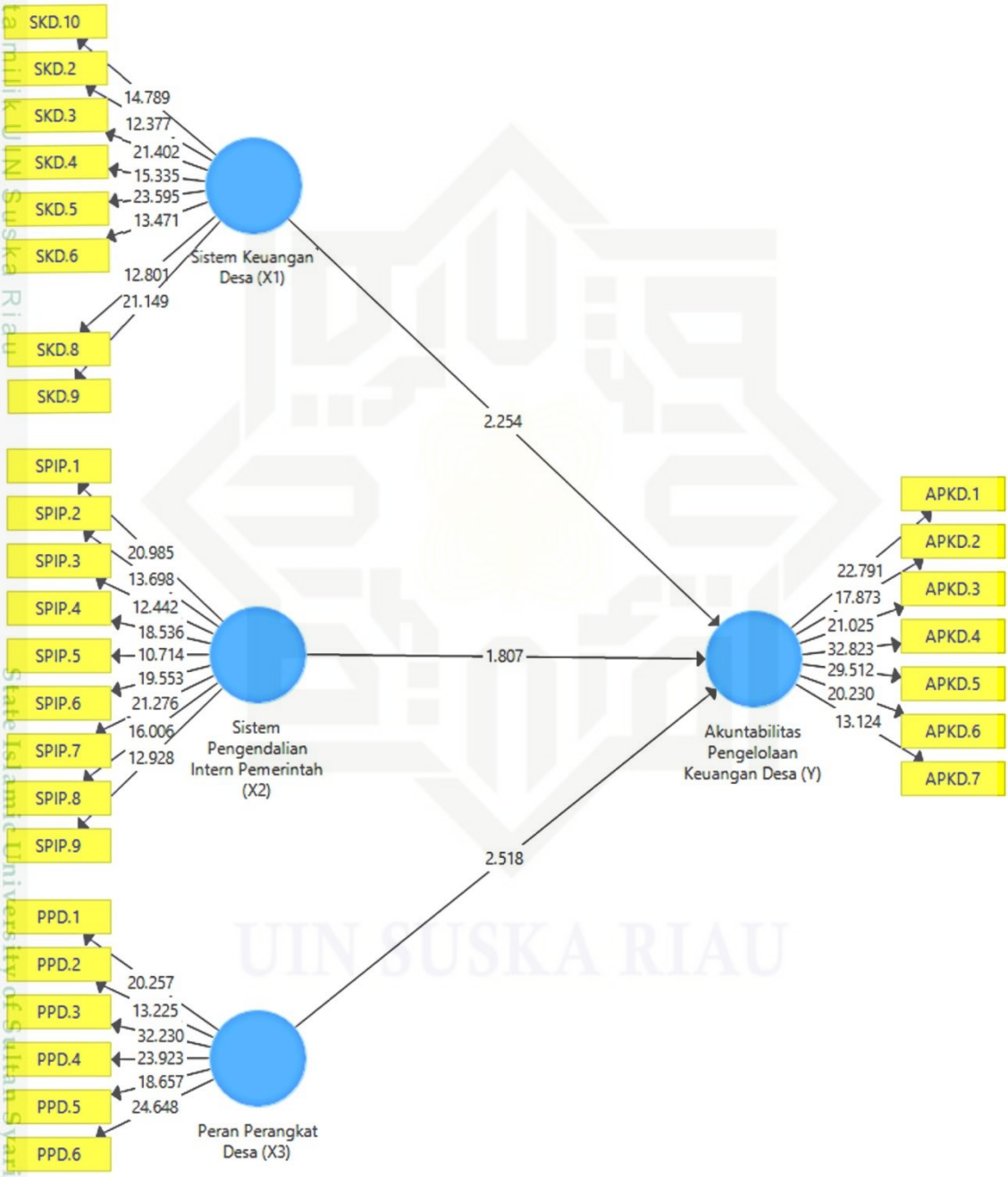

Sumber : *Output SmartPLS* 3.0, Tahun 2021

LAMPIRAN 17
Surat izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2334/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 06 April 2021 M
23 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Meysa Khalifa
NIM. : 11773201122
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40658
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2334/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**MEYSA KHALIFA**
2. NIM / KTP	:	11773201122
3. Program Studi	:	AKUNTANSI
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
7. Lokasi Penelitian	:	SELURUH DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 April 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/117

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40658 Tanggal 9 April 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset** Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**MEYSA KHALIFA**
NIM	:	11773201122
Program studi/Jenjang	:	Akuntansi / S1
Alamat	:	Jl. Cendrawasih RT. 005 RW. 002 Kel. Sungai Piring Kec. Batang Tuaka
Judul Penelitian	:	**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
Lokasi Penelitian	:	**SELURUH DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
4. Pelaksanaan penelitan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 April s/d 27 Juli 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

Tembilahan, 27 April 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kabid Ketahanan Ekososbud,Agama dan Ormas,

H.NAZARUDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN 18
Tanda Terima Kuesioner

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDI SUPRIODI

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Nama Desa : PASIR EMAS

Alamat : Jalan Sungai Ajak

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PASIR EMAS, 9/ JUNI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA PASIR EMAS
KECAMATAN BATANG TUAKA

(DEDI SUPRIODI)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK

Jabatan : KEPALA DESA SUNGAI LUAR

Nama Desa : SUNGAI LUAR

Alamat : SUNGAI LUAR

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI LUAR, 16 JUNI /2021

(TAUFIK)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI SASMITA

Jabatan : KEPALA DESA

Nama Desa : SUNGAI DUSUN

Alamat : JL. LINTAS BATANG TUAKA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI DUSUN, 16/ JUNI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA SUNGAI DUSUN KECAMATAN BATANG TUAKA

(EDI SASMITA)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAFAR ABDUL AZIS

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Nama Desa : SUNGAI JUNJANGAN

Alamat : Jl. JENDRAL SUDIRMAN PASAR LAMA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI JUNJANGAN 07 JUNI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA SUNGAI JUNJANGAN
KECAMATAN BATANG TUAKA

(JAFAR ABDUL AZIS)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SYAHRAN, SH

Jabatan : KEPALA DESA

Nama Desa : SUNGAI RAWA

Alamat : SUNGAI RAWA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI RAWA, 17/ JUNI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA SUNGAI RAWA

(H. SYAHRAN, SH)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jartono

Jabatan : Kaur Perencanaan

Nama Desa : Tanjung Siantar

Alamat : Jl. Pendidikan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Siantar, 17 Juni /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA TANJUNG SIANTAR
KECAMATAN BATANG TUAKA

(Jartono)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARBAWI AMd

Jabatan : Kepala Desa

Nama Desa : SIMPANG JAYA

Alamat : SIMPANG JAYA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SIMPANG JAYA 22 JUNI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA

(MARBAWI AMd)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARTINI WATI

Jabatan : KEPALA DESA

Nama Desa : SUNGAI RAYA

Alamat : PARIT 3 SUNGAI RAYA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI RAYA, 1 / JULI /2021

(KARTINI WATI, S.Pd)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRUDDIN

Jabatan : SEKDES

Nama Desa : KUALA SEBATU.

Alamat : PART ANAK CAHAYA KEMBANG

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KUALA SEBATU, 1/ JUL /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA

(AMIRUDDIN)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD. SALAM

Jabatan : KAUR KEUANGAN

Nama Desa : SIALANG JAYA

Alamat : RT 06 RW 02 DESA SIALANG JAYA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SIALANG JAYA, 09 / JULI /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA SIALANG JAYA
KECAMATAN BATANG TUAKA

(ABD. SALAM)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAHAR FADI, SE

Jabatan : KAUR KEUANGAN

Nama Desa : TASIK RAYA

Alamat : JL. RAYA PARIT 9 RT 04 RW 06.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TASIK RAYA, 13 / Juli /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA TASIK RAYA
KECAMATAN BATANG TUAKA

(NAHAR FADI, SE.)

TANDA TERIMA KUESIONER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZMI

Jabatan : KEPALA DESA

Nama Desa : GEMILANG JAYA

Alamat : DESA GEMILANG JAYA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meysa Khalifa

NIM : 11773201122

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah meyebarkan kuesioner yang berjudul **"PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)"** sejak Juni sampai dengan Juli 2021.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

GEMILANG JAYA, 16 '7' /2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA GEMILANG JAYA
KECAMATAN BATANG TUAKA

(AZMI)

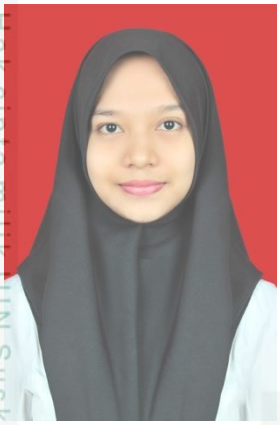

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Meysa Khalifa, lahir di Kelurahan Sungai Piring pada tanggal 21 Mei 1999, Ayahanda bernama H. Ramlan dan Ibunda bernama Hj. Siti Hairani. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 001 Sungai Piring, MTsN 094 Tembilahan, kemudian dilanjutkan dengan SMKN 1 Tembilahan.

Pada tahun 2017, melalui jalur prestasi/ undangan mandiri penulis diterima menjadi mahasiswi program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesakan skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si. Pada tanggal 07 Oktober 2021 penulis mengikuti ujian *Oral Comprehensive* dan dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar S.Ak (Sarjana Akuntansi).